

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas tantangan *Greenpeace* dalam menangani masalah deforestasi hutan di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Topik dari penelitian ini merupakan salah satu isu non-tradisional yang merupakan isu lingkungan. Dalam Penelitian Ini, isu lingkungan yang dibahas tidak hanya melibatkan aktor pemerintah saja di dalamnya, melainkan terdapat aktor non-pemerintah, yaitu *Greenpeace* selaku NGO atau NGO dalam menangani masalah deforestasi hutan di Papua.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkenal akan hutan tropis yang sangat besar di dunia bersama dengan Brazil dan Kongo. Hutan Indonesia pada tahun 2014 diketahui memiliki luas 50% dari seluruh daratan Indonesia yang ada atau 95,7 juta ha yang tersebar luas di seluruh Indonesia.¹ Di antaranya, Papua merupakan wilayah Indonesia yang memiliki lahan hutan alam paling luas dengan meliputi 83% daratan Bioregion Papua.² Deforestasi Papua diprediksi mulai naik Ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan yang mengatur sistem persetujuan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sehingga para penguasa bekerjasama dalam mengeksploitasi

¹Monavia Ayu Rizaty, Luas Lahan Berhutan Indonesia Berkurang 1,6 Juta Ha Sepanjang 2014-2019, diakses dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/luas-lahan-berhutan-indonesia-berkurang-16-juta-ha-sepanjang-2014-2019>, (29/10/2021, 20:07 WIB)

²FWI, Lembar Fakta Tanah Papua Deforestasi dari Masa ke Masa, diakses dalam (FWI, 2019), (29/10/2021, 20:15 WIB)

hutan Indonesia termasuk Papua. Sehingga pada 2019 terdapat 168.471 ha hutan alam di Papua yang telah berubah menjadi perkebunan sawit.³

Lokasi Papua berjarak 2 zona waktu dan lebih dari 5 jam dengan pesawat dari ibukota, Jakarta dan kurangnya infrastruktur seperti jalan, listrik, telekomunikasi, dan air mengalir telah menjadi wilayah terkecil maju dan termiskin di Indonesia. Namun di sisi lain, ini berarti bahwa hutan Papua, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati terbanyak di planet ini, sebagian besar tidak dapat diakses oleh perusahaan pertanian dan pertambangan yang merusak hutan Sumatera dan Kalimantan. Namun, ini telah berubah dalam beberapa tahun terakhir karena pemerintah telah berinvestasi kembali dalam pembangunan daerah. Perusahaan kelapa sawit telah masuk dan dengan cepat membuka sebagian besar hutan terakhir di Indonesia. Laporan koalisi juga menunjukkan bahwa penyebaran kelapa sawit merupakan faktor utama deforestasi Papua, dan izin yang dikeluarkan pemerintah membuat deforestasi legal.

Terdapat sekitar 250 suku adat Papua yang masih bergantung pada hutan sebagai sumber makanan mereka. Dari 250 suku yang ada, terdapat suku-suku yang masih bergantung pada sagu dalam kehidupannya.⁴ Sagu yang berasal dari hutan sagu Papua merupakan makanan pokok masyarakat adat dan budidaya sagu yang berskala kecil yang dilakukan masyarakat merupakan mata penghasilan masyarakat Papua. Sekitar 5,3 juta ha lahan sagu yang digunakan oleh masyarakat Papua dari

³Greenpeace Indonesia, Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua, diakses dalam, (29/10/2021, 23:08 WIB)

⁴ YoanesLitha, AlihFungsiHutan Papua untukSawitAncamSumberPangan Masyarakat Adat, diaksesdari <https://www.voaindonesia.com/a/alih-fungsi-hutan-papua-untuk-sawit-ancam-sumber-pangan-masyarakat-adat-/6218497.html>, (29/10/2021, 21:39 WIB)

6,3 juta ha lahan sagu di dunia. Selain itu juga, hutan dianggap sebagai tempat yang sakral.

Kerusakan Hutan yang diakibatkan oleh deforestasi sangatlah besar dan luas mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan bencana lingkungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar dan seluruh masyarakat Indonesia. Menurut CIFOR (Center for International Forestry Research), sekitar 48,8 juta penduduk dari 220 juta penduduk tinggal di kawasan hutan Negara dan 10,2 juta diantaranya dianggap miskin.⁵

Sebuah organisasi lingkungan yang merupakan bagian dari koalisi di balik laporan tersebut, mengatakan bahwa melihat tren deforestasi secara regional daripada nasional penting karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi pada hutan negara. “kitab isa melihat laju deforestasi secara nasional karena lajunya menurun selama lima tahun terakhir, tetapi deforestasi cenderung meningkat di provinsi-provinsi berhutannya.”

Selama 2 dekade terakhir, wilayah Papua kehilangan 663.3 hektar tutupan hutan alam; 71% dari deforestasi ini terjadi antara tahun 2011 dan 2019. Bagian tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2015, ketika 89.881 hektar hutan ditebang. “klaim bahwa deforestasi di Indonesia telah berkurang tidak ada artinya ketika 80% deforestasi di Papua,” kata Mufthi. Mengapa, karena kita adalah negara kepulauan. Deforestasi harus ditafsirkan lebih tepat” daripada rata-rata nasional.⁶

⁵ Deddy Winarwan, Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat, Jurnal KAWISTARA Vol. 1 No. 3 Desember 2011, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, Hal. 214

⁶ Hans Nicholas Jong, Papua deforestation highlights eastward shift of Indonesia forest clearing, Mangabay News, diakses dari <https://news.mongabay.com/2021/03/papua-deforestation-highlights-eastward-shift-of-indonesia-forest-clearing/> (26/10/2022 15:20)

Presiden Joko Widodo yang biasanya disapa Jokowi merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang telah menjabat selama 2 periode dari tahun 2014-2019 dan 2019-2024. Jokowi pernah mengumumkan rencana untuk menetapkan peraturan untuk mencegah izin tanam kelapa sawit baru pada tahun 2016.⁷ Namun, diketahui bahwa SK LKH atau pelepasan kawasan hutan terus menerus dikeluarkan untuk pembangunan sawit oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Namun, Izin Usaha Perkebunan (IUP) hanya ditangguhkan untuk areal dalam kawasan hutan, pada Areal Penggunaan Lain (APL), IUP tetap dapat diterbitkan, meskipun kawasan areal ini masih berhutan seperti yang terjadi di tanah Papua. Penerbitan izin lokasi baru dan izin lingkungan tidak tertunda sama sekali, kata larangan kelapa sawit memungkinkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) untuk mengeluarkan peraturan resolusi pelepasan kawasan hutan jika perusahaan telah mencapai tahap tertentu dalam prosesnya. Dimungkinkan juga untuk melanjutkan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Beberapa penanaman kelapa sawit telah berhasil memperoleh izin baru dengan alasan dikecualikan.

Analisis citra satelit dari area yang dibuka untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa pada tahun 2019, 15,595 hektar dibuka di bawah izin ini, atau hampir sepertiga dari seluruh deforestasi di Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanggapi laporan LSM bahwa hampir semua deforestasi di wilayah Papua karena izin yang diberikan sebelum Presiden Joko Widodo menjabat pada tahun 2014. FWI menambahkan, izin konvensi hutan

⁷ Greenpeace, 2021, Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. (14/01/2022 12:23 WIB)

dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat.

Terdapat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah yang dinyatakan untuk menghubungkan desa-desa terpencil dan daerah pemukiman, dalam banyak kasus jalan baru melayani pertambangan, perkebunan dan area penebangan kayu yang tersebar di seluruh Papua. Laporan tersebut menunjukkan bagaimana 2 jalan di Norda Tambrau yang sudah direncanakan memudahkan perusahaan pemasok hutan yang sudah beroperasi di sana untuk mengangkat kayu. Hal ini berjalan lurus dengan kegiatan pertambangan yang dikukuhkan oleh pemerintah sebelumnya dengan proyek-proyek infrastruktur yang didukung pemerintah sekarang.

Hal tersebut mengakibatkan terus terjadinya deforestasi hingga meningkat setiap tahunnya dan masifnya pembangunan infrastruktur dan penambahan lahan perkebunan sawit yang memiliki izin pinjam pakai. Dengan memiliki izin tersebut, deforestasi bukanlah hal yang ilegal melainkan legal. Izin pinjam pakai tersebut digunakan untuk proyek pembangunan strategis dari, pembangunan kelapa sawit yang merupakan tujuan utama dari pelepasan kawasan hutan.⁸

NGO yang merupakan bagian dari Global Civil Society yang bergerak di bidang lingkungan kemudian mempertanyakan langkah-langkah yang diambil Joko Widodo yang dianggap pro terhadap deforestasi yang di mana perluasan lahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada dapat merusak lingkungan dan berakhir

⁸ Koalisi Indonesia Memantau, 2021, Menatap ke Timur: Deforestasi Dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua, Jakarta: Indonesia, diakses dalam https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis19S0toz1AhUzTmwGHbsuDz8QFnoEAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fauriga.or.id%2Fcms%2Fuploads%2Fpdf_id%2Freport%2F7%2F1%2Fdeforestasi_dan_pelepasan_kawasan_hutan_di_tanah_papua_id.pdf&usg=AOvVaw3Csz5133BRRIFITRmQfPr7 (24/12/2021 3:22 WIB)

menghilangnya hutan yang yang dipakai masyarakat adat dan juga merusak ekosistem yang ada. Masyarakat maupun Greenpeace selaku NGO mulai bergegas untuk menyelesaikan masalah ini. Greenpeace kemudian menanggapi pidato Joko Widodo pada KTT perubahan iklim COP 26 pada 1 November 2021 yang dengan menyatakan bahwa terdapat peningkatan deforestasi dari 2,45 juta ha pada tahun 2003-2011 menjadi 4,8 juta ha pada 2011-2019. Terdapat penurunan pada tahun 2018-2021 namun, hal tersebut dipercaya merupakan imbas dari pandemic sehingga memperlambat pembukaan lahan. Selain itu, Undang-Undang yang dapat memperluas celah orang-orang berkepentingan untuk terus melakukan deforestasi, seperti RUU Cipta kerja.⁹

Banyaknya masyarakat maupun NGO yang menolak akan deforestasi dan merasakan langsung dampak dari deforestasi tersebut berusaha menghentikannya termasuk Greenpeace. Langkah-langkah untuk mengurangi ancaman dan masalah yang berkaitan dengan perubahan iklim tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus dilakukan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil global. Masa depan bumi merupakan tanggung jawab bersama yang dimana dapat memastikan kesejahteraan bersama.¹⁰

Greenpeace merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan yang berdiri pada tahun 1971.¹¹ Greenpeace merupakan salah satu

⁹ Asep Komarudin, RUU CIPTA KERJA MELEMAHKAN ATURAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, Greenpeace, Diakses dalam <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/5592/ruu-cipta-kerja-melemahkan-aturan-perlindungan-lingkungan-hidup/>, (27/06/2022, 3:44 WIB)

¹⁰ Najamuddin Khairur Rijal, *The Role Global Civil Society at The Local Level in Climate Change Mitigation: A Case Study of Earth Hous's Activities in Malang*, Global: Jurnal Politik Internasional Vol. 22 No. 2 2020, diakses melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=global>, hal 193

¹¹ Greenpeace, sejarah Greenpeace, diakses (29/10/2021, 23:41 WIB)

organisasi lingkungan yang secara aktif mengkritik dan mengungkapkan pendapatnya terhadap deforestasi yang terjadi di Papua. Kampanye-kampanye terus dilakukan oleh Greenpeace di media sosial maupun langsung turun di jalan untuk menunjukkan aksi yang nyata untuk memberikan dukungan mereka kepada masyarakat dan lingkungan. Laporan yang dibuat oleh Greenpeace seakan membuka mata masyarakat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Tuntutan yang terus disuarakan kepada pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih memihak kepada masyarakat.

Keunikan dari topik ini adalah penelitian ini melihat upaya-upaya yang berusaha dilakukan oleh Greenpeace dengan adanya tantangan-tantangan yang ada dalam menangani masalah deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana banyaknya SK PKH yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sendiri sehingga pada tahun 2015 terjadi deforestasi tertinggi yang membuat kerugian terhadap masyarakat adat dan seluruh masyarakat. Terbitnya SK PKH yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai kebijakan Joko Widodo yang kurang menyadari akan akibat yang akan timbul dengan adanya deforestasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu kepada lingkungan dan masyarakatnya. Area deforestasi yang awalnya berada di wilayah barat Indonesia (Sumatera dan Kalimantan) sekarang bergeser menjadi wilayah Timur (Papua) yang dimana dengan penyebab utama adalah bisnis atau ekspansi perkebunan kelapa sawit yang dapat menyebabkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat adat Papua yang masih sangat bergantung pada hutan alam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tantangan Greenpeace dalam menangani masalah deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Joko Widodo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui bagaimana deforestasi yang terjadi di Papua pada masa pemerintahan Joko Widodo.
2. Mengetahui upaya dari Greenpeace dalam mengatasi deforestasi
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Greenpeace dalam menekan angka deforestasi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari adanya penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Akademisi

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu pada kajian *Theory of Change* dan *Environmental scarcity* (kelangkaan lingkungan).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi deforestasi yang terjadi di Papua dan bisa melihat bagaimana upaya dan tantangan yang dilakukan oleh Greenpeace.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama adalah skripsi dari Wulan Maghfirah yang berjudul Tantangan Greenpeace dalam menangani kasus perburuan paus oleh Jepang di Laut Antartika.¹² Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional tentang laut bebas dan konsep organisasi non-pemerintah. Penulis menjelaskan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Greenpeace selaku organisasi nonpemerintah yang bergerak dibidang lingkungan untuk mengatasi kasus perburuan paus oleh Jepang. Adanya Perburuan paus oleh Jepang. Adanya perburuan paus yang telah menjadi tradisi oleh Jepang sejak ribuan tahun lamanya kemudian menjadikan keresahan oleh Greenpeace karena dianggap dapat merusak ekosistem laut dan dapat menyebabkan punahnya spesies paus yang ada di lautan. Tidak hanya masyarakat saja yang terlibat dalam proses perburuan paus yang terjadi, melainkan pemerintah juga turut serta dalam proses penangkapan paus. Sehingga terjadi lemahnya penegakkan peraturan yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Greenpeace untuk menghentikan perburuan paus yang terjadi di Jepang selaku negara yang melakukan perburuan paus terbesar di dunia. Greenpeace kemudian membawa permasalahan perburuan paus ini ke ICJ yang menghasilkan program JAPRA II dimana Jepang harus segera menekan maupun menghentikan perburuan paus yang ada di negaranya..

¹²Maghfirah, Wulan. 2018. Tantangan Greenpeace dalam Menangani Kasus Perburuan Paus oleh Jepang di Laut Antartika. Skripsi. Malang: Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang.

Namun karena adanya ikutcampurtangan pemerintah Jepang dalam perburuan paus ini, sehingga penegakkan keputusan ICJ menjadi kurang ketat. Banyak permintaan masyarakat Jepang dalam konsumsi Daging ikan paus juga menjadi salah satu tugas dari Greenpeace untuk mengedukasi masyarakat. Se jauh ini, Greenpeace belum dapat mencapai target mewujudkan *zero catching whaling* di Jepang.

Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis. Persamaan yang adalah isu yang diangkat kedua penelitian ini adalah isu lingkungan, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Greenpeace dalam menghadapi isu yang dibahas. Perbedaan yang ada adalah objek yang berbeda, dimana penulis ini mengambil objek perburuan paus oleh Jepang sedangkan penelitian penulis memiliki objek deforestasi yang terjadi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian kedua berjudul “Dampak Laju Deforestasi terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Indonesia” oleh I Putu Gede Ardhana.¹³ Penelitian ini menjelaskan bagaimana laju Deforestasi yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap punahnya ekosistem yang ada di Indonesia. Kebakaran hutan yang terjadi dari tahun 1960-an hingga 2015 yang terjadi terus menerus mengakibatkan punahnya beberapa spesies, genetik, dan ekosistem yang ada.

¹³I Putu Gede Ardhana, *Dampak Laju Deforestasi terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, Vol.III, No. 2 September 2016, Bali: Universitas Udayana

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas deforestasi yang terjadi di Indonesia. Namun, perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu berfokus pada negara Indonesia secara keseluruhan dan dampak deforestasi yang terjadi, penelitian penulis berfokus pada tantangan dari Greenpeace dalam menangani deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo .

Penelitian ketiga berupa jurnal yang berjudul “Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)” oleh Fariz Ruhiat, Dudy Heryadi, dan Akim.¹⁴ Jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang dimana menyampaikan fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian jurnal ini juga menggunakan konsep strategi NGO lingkungan yang pada dasarnya digunakan NGO lingkungan dalam melakukan tugasnya di suatu wilayah.

Jurnal ini menjelaskan bahwa Polusi Udara yang ada di beberapa kota besar di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan dan Greenpeace selaku NGO yang bergerak bidang lingkungan merasa harus menyuarakan dan menyelesaikan masalah ini. Jakarta kemudian menjadi salah satu wilayah Greenpeace untuk menanggulangi polusi udara. Masalah Kesehatan merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan karena adanya polusi udara.

Hasil dari jurnal ini adalah Greenpeace selaku NGO lingkungan telah berusaha dengan maksimal untuk menanggulangi polusi udara di Jakarta. Dengan

¹⁴Ruhiat, Fariz dan Heriyadi, Dudy dan Akim. 2019. Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). Andalas Journal of International Studies Vol. 8 No. 1

menggunakan strategi yang oleh McCormick seperti *undertaking research*, *campaigning*, dan *organizing public protest*. Tidak hanya itu, Greenpeace juga bekerjasama dengan aktor lain dalam melakukan penelitiannya seperti bekerjasama dengan peneliti dari Universitas Harvard yang kemudian mengkaji bahaya batubara untuk kesehatan. Greenpeace juga sangat aktif dalam menyuarakan tentang polusi udara di Jakarta berupa kampanye dan aksi nyata di berbagai lokasi.

Tentunya jurnal ini dan penelitian penulis memiliki kesamaan seperti isu yang diangkat sama isu lingkungan dan melihat bagaimana NGO menjadi aktor yang terlibat dalam suatu kasus yang berusaha untuk menyelesaikan kasus tersebut. Akan tetapi perbedaan yang ada antara jurnal ini dengan penelitian penulis adalah jika jurnal penelitian terdahulu ini lebih fokus pada strategi NGO dalam menangani polusi udara di Jakarta, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tantangan yang dialami oleh Greenpeace dalam menangani deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian keempat merupakan penelitian oleh Bella Putri berjudul “Upaya Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia”.¹⁵ Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya Greenpeace untuk menangani kerusakan lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Pada jurnal mengatakan bahwa Greenpeace melakukan serangkaian kampanye dengan slogan “hutan Tanpa Api”, melakukan aksi *nonviolent direction*, dan juga kampanye-kampanye lainnya yang dilakukan

¹⁵Bella Putri, Upaya Greenpeace Dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, JOM FISIP Vol 6 Edisi I Januari-Juni 2019, Riau: Universitas Riau

dengan aktif oleh Greenpeace yang berguna untuk melindungi hutan Indonesia dari kebakaran hutan.

Persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah jika pada penelitian terdahulu ini lebih fokus pada upaya Greenpeace dalam menangani kerusakan hutan setelah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada tantangan Greenpeace dalam menangani deforestasi hutan di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian kelima berjudul Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon oleh Kartika Mandala Putri.¹⁶ Pada penelitian ini membahas bagaimana Greenpeace selaku NGO bidang lingkungan berpengaruh dalam komitmen Moratorium Kedelai di Brazil dalam upaya untuk mengurangi deforestasi hutan Amazon yang disebabkan karena perluasan perkebunan kedelai yang telah mengambil area hutan. Greenpeace NGO yang dimana menempatkan Greenpeace sebagai kompetitor dari pemerintah. Kampanye yang dilakukan Greenpeace yang memiliki tujuan yang ditargetkan adalah opini masyarakat sehingga NGO atau dalam penelitian ini adalah Greenpeace bersifat *bottom-up*. Greenpeace juga selalu melakukan monitor terhadap Moratorium Kedelai yang harus berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Dapat dilihat persamaan kedua penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama bergerak dibidang lingkungan dan berfokus pada menekan

¹⁶Kartika Yustika Mandala Putri, Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon, Jurnal Hubungan Internasional, Tahun IX No. 1 Januari-Juni 2016, Surabaya: Universitas Airlangga

deforestasi di wilayah tertentu dengan melihat peran dari Greenpeace selaku NGO dalam menangani suatu kasus atau masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah jika pada penelitian ini fokusnya adalah pengaruh Greenpeace dalam diplomasi mereka dalam menekan deforestasi hutan Amazon. Sedangkan penelitian penulis fokus pada tantangan yang dialami oleh Greenpeace dalam menangani deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Penelitian keenam berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat oleh Sefa Mertinesya.¹⁷ Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Indonesia dan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Masih kurangnya tanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat adat karena saat ini, masih banyak masyarakat adat yang kehilangan haknya, terutama hak tentang sumber daya alam saat ini, banyak orang yang diambil secara sewenang-wenang oleh negara, di hutan adat/ hutan adat megugaskan/menunjuk/mengugaskan menggunakan hak untuk pihak lain dalam bisnis hutan/perkebunan/pertambangan atau konversi dan penyitaan tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan masyarakat adat. Hal ini berkontradiksi dengan Pasal 18 ayat (2) UUDRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan

¹⁷ Sefa Mastinesya, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, 2020, Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1, Diakses melalui Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat | Martinesya | Nurani Hukum (untirta.ac.id) (Juli 2022)

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu membahas tentang hak asasi manusia masyarakat adat yang dimana didalamnya juga menjelaskan hak sumber daya alam masyarakat adat, sedangkan perbedaannya terdapat dibagian pada penelitian yang diteliti peneliti membahas studi kasus yang terjadi pada deforestasi Papua pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Jurnal ketujuh “An Indigenous People’s Right to Environmental Self-Determination: Native Hawaiians and the Struggle against Climate Change Devastation” oleh D. Kapua’ala Sproat.¹⁸ Jurnal ini membahas tentang bagaimana respon masyarakat adat mengklaim dan menggunakan hak adat atas penentuan nasib lingkungan sendiri. Respon dari perubahan iklim oleh masyarakat adat membutuhkan interaksi dengan Lembaga lainnya seperti negara, bisnis swasta, dan sebagainya.

Klaim masyarakat adat atas sumber daya alam yang dapat dikatakan sebagai “keadilan lingkungan”. Masyarakat adat dan rezim hukum lokal berinteraksi di sekitar keadilan lingkungan, isi dan bahkan hasil dari interaksi ini berpotensi tergantung pada tingkat keadilan restorative hukum setempat. Hal tersebut penting. Rezim hukum lokal termasuk prinsip keadilan restoratif dalam perlakuan terhadap masyarakat adat menciptakan kesenjangan dalam membentuk interaksi ini dan

¹⁸ D. Kapua’ala Sproat, *An Indigenous People’s Right to Environmental Self-Determination: Native Hawaiians and the Struggle Against Climate Change Devastation*, 2016, *Stanford Environmental Law Journal* Vol. 35 No. 2, Diakses di <https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/server/api/core/bitstreams/4c282d9e-7efb-43d5-a379-8767d2d1a3db/content> (07/07/2022 22:23WIB)

membuat keputusan yang relevan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional penentuan nasib sendiri masyarakat adat.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas hak asasi manusia masyarakat adat. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian penulis lebih fokus pada mengapa Greenpeace menghadapi tantangan dalam memerangi deforestasi sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus pada bagaimana masyarakat adat Hawaii yang berjuang dalam keadilan lingkungan menghadapi perubahan iklim

Penelitian kedelapan adalah “Hambatan Greenpeace dalam Mengatasi Deforestasi di Brazil Pada Masa Pemerintahan Jair Bolsonaro” oleh Uswatun Hasanah. Membahas tentang deforestasi Amazon pada masa pemerintahan Jair Bolsonaro yang dimana berpengaruh terhadap peningkatan deforestasi di Amazon yang meningkat hingga 104%. Pemerintahan Jair Bolsonaro memiliki prioritas utama, yaitu pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, peran perusahaan asing dan lokal juga terlibat, dimana perusahaan memiliki peran penting dalam kegiatan pembiayaan.

Mengikuti sikap Jair Bolsonaro, komunitas internasional seperti NGO dan pemerhati lingkungan mengkritik tindakan sebagai sangat pro-deforestasi dan hanya berfokus pada pembangunan daripada konservasi, banyak yang mengkritik skeptisismenya tentang perubahan iklim global. Misalnya, direktur program Amazon Watch Christian Poirer mengatakan: “kehancuran ini secara langsung terkait dengan retorika anti-lingkungan Presiden Bolsonaro, yang salah mengartikan perlindungan hutan dan hak asasi manusia sebagai hambatan bagi

pertumbuhan ekonomi Brasil Greenpeace sebagai organisasi NGO juga bagian dari Global Civil Society mengutuk keras tindakan Jair Bolsonaro.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kelangkaan lingkungan yang disebabkan karena deforestasi dan menjelaskan dampak deforestasi, seperti alokasi sumber daya yang tidak merata antara pemerintah dan suku asli yang terkena deforestasi. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu berfokus pada ekonomi yang dimana perusahaan transnasional yang juga ikut berperan penting dalam eksplorasi dan keuntungan dan negara menjadikan model ini sebagai kebijakan. Sedangkan perbedaannya studi kasus penelitian terdahulu adalah deforestasi di Amazon pada pemerintahan Jair Bolsonaro sedangkan studi kasus penulis adalah deforestasi Papua pemerintahan Joko Widodo.

Jurnal kesembilan dari Mirza Satria Buana yang berjudul “Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antar Doktrin Pembangunan dan Hukum Asasi Manusia Internasional Indonesia memiliki dasar negara Pancasila yang dimana pada sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Adanya Undang-Undang maupun peraturan yang mengatur tentang keadilan bagi masyarakat adat terjadi secara bertahap. Begitu pula dengan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, yang dimana terdapat Penetapan Hutan Adat yang dikeluarkan Surat Keputusan Menteri LHK pada 2016.

Namun, peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak kelemahan. Pelaksanaan sering disalahpahami oleh polisi hutan, polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini menjadi pembangunan bukan hanya domain pemerintahan dan pelaku komersial,

tetapi domain inklusif dan partisipasi. Bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang dipahami bukan hanya sebagai angka kuantitatif dan statistic, tetapi sebagai perspektif yang beragam tentang hak asasi manusia.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian peneliti adalah hak asasi manusia adat atas sumber daya alam sangat penting dan butuh adanya perlindungan dari pemerintah sehingga tidak dianggap abaikan hak masyarakat minoritas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu fokus pada isu masyarakat adat dalam perspektif normatif-doktrinal dari hukum Hak Asasi Manusia Internasional, sedangkan penelitian peneliti berfokus bagaimana mengurangi angka deforestasi pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Penelitian terdahulu kesepuluh berjudul “Reducing deforestation in Colombia while building peace and pursuing business as usual extractivism?” oleh Torsten Krause.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan kontradiksi dan ketegangan dalam implementasi REDD+ di Kolombia. Selama implementasi, penggunaan lahan pedesaan diubah, yang sebenarnya menciptakan konflik baru dan menyebabkan deforestasi di Kolombia. Bukannya membangun perdamaian, justru menimbulkan sengketa pertanahan.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa program REDD+ di Kolombia justru berkontribusi pada pendekatan neoliberal yang kontradiktif, dimana program tersebut menjanjikan untuk melindungi lingkungan tetapi diatas semua itu mendukung keberadaan industri ekstraktif di bidang pertambangan, peternakan,

¹⁹ Torsten Krause, *Reducing deforestation in Colombia while building peace and pursuing business as usual extractivism?*, Journal of Political Ecology Vol. 27, 2020, diakses di <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.2458/v27i1.23186>

dan pertanian. Pada akhirnya, program REDD itu tidak berguna dan justru mengarah pada peningkatan deforestasi dan degradasi hutan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa program REDD menjadi alasan deforestasi terus menerus meningkat sedangkan pada penelitian peneliti kebijakan presiden yang mendukung peningkatan deforestasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas deforestasi

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No.	Judul Penelitian	Metode/Teori/Konsep Penelitian	Hasil
1.	Tantangan Greenpeace dalam menangani kasus perburuan paus oleh Jepang di Laut Antartika. Oleh : Wulan Maghfirah	Hukum Internasional	Perburuan paus di Jepang sudah menjadi tradisi sejak ribuan tahun lalu. Namun hal tersebut dapat merusak ekosistem laut yang berakibat punahnya spesies paus yang ada. tidak hanya masyarakat saja yang terlibat dalam kasus ini, melainkan pemerintah juga terlibat di dalamnya sehingga penegakkan peraturan menjadi semakin lemah. Greenpeace kemudian membawa permasalahan ini ke ICJ dan menghasilkan program JAPRA II yang mengharuskan Jepang menghentikan perburuan paus. namun karena ada ikut campur tangan pemerintah dalam perburuan paus, penegakkan program JAPRA II kurang ketat. Edukasi Greenpeace kepada masyarakat Jepang merupakan tugas yang sangat penting agar permintaan paus semakin menurun dan mencapai target Zero Catching Whaling.
2.	Dampak Laju Deforestasi	Pendekatan peraturan dan Perundang-	lajunya deforestasi yang terus terjadi di Indonesia menyebabkan

No.	Judul Penelitian	Metode/Teori/Konsep Penelitian	Hasil
	<p>terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Oleh : I Putu Gede Ardhana</p>	undangan	<p>punahnya ekosistem yang ada di Indonesia. kebakaran hutan dari 1960-an hingga 2015 yang terus terjadinya mengakibatkan punahnya beberapa spesies, genetik, dan ekosistem yang ada. generalisasi peraturan maupun perundang-undangan haruslah menjadi fokus dari pemerintah</p>
3.	<p>Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). Oleh : Fariz Ruhiat, Dudy Heryadi, dan Akim</p>	Kualitatif deskriptif	<p>Greenpeace berusaha untuk menanggulangi masalah polusi udara di Jakarta selaku NGO lingkungan. Greenpeace sendiri menggunakan strategi McCormick seperti Undertaking research, campaigning, dan organizing public protest dalam hal menyatakan kondisi polusi udara di Jakarta. tidak hanya itu, Greenpeace juga melakukan kerjasama dengan peneliti Harvard yang mengkaji bahaya batubara yang menghasilkan polusi udara bagi kesehatan.</p>
4.	<p>Upaya Greenpeace dalam Menangani Kerusakan Lingkungan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Oleh : Bella Putri</p>	Konstruktivis	<p>Greenpeace selaku NGO melakukan berbagai upaya seperti kampanye untuk menangani lingkungan setelah adanya kebakaran hutan di Indonesia. selain itu, Greenpeace juga melakukan advokasi terhadap pemerintahan untuk keterbukaan informasi dan data-data peta hutan Indonesia yang berhubungan dengan program yang dilakukan oleh Greenpeace. Program toolkit pendekatan High Carbon Stock (HCS) yang berguna untuk memperbaiki lingkungan. tidak hanya memiliki kemitraan dengan pemerintah, Greenpeace juga membangun kemitraan dengan organisasi lingkungan lainnya</p>

No.	Judul Penelitian	Metode/Teori/Konsep Penelitian	Hasil
			seperti WALHI, WBH, dan WARSI.
5.	Diplomasi Greenpeace dalam Menekan Deforestasi Amazon. Oleh : Kartika Mandala Putri	Diplomasi	Greenpeace berupaya dalam mengurangi deforestasi Amazon yang disebabkan perluasan kedelai. dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kampanye Greenpeace yang tujuannya memiliki target opini masyarakat sehingga bersifat bottom-up. selain itu, Greenpeace menempatkan dirinya sebagai kompetitor [emerintah dan terus melakukan monitor terhadap Moritorium Kedelai agar terus berjalan sesuai mekanisme yang ada.
6.	berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. Oleh: Sefa	Yuridis Normatif	banyaknya masyarakat adat yang kehilangan haknya karena kurangnya tanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat adat oleh pemerintah terutama hak atas sumber daya alam. Kurangnya pemberitahuan kepada masyarakat adat saat hutan adat mereka digunakan oleh pihak lain dalam bisnis hutan/perkebunan/pertambangan maupun konversi. hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-undang Pasal 18 Ayat (2) UUNDRI Tahun 1945. Oleh karena itu, masyarakat adat memiliki hak yang dijamin secara konstitusional sepanjang hidupnya, menurut pengembangan masyarakat dan prinsip NKRI.
7.	An Indigenous People's Right to Invirenmental Self-Determination: Native	Pendekatan Restorative justice	Respon masyarakat adat dalam mengkalim dan menggunakan hak adat atas penentuan nasib mereka atas lingkungan sendiri. respon mereka ini haruslah ada interaksi antara negara, bisnis swasta, dan

No.	Judul Penelitian	Metode/Teori/Konsep Penelitian	Hasil
	Hawaiians and the Struggle against Climate Change Devastation. Oleh : D. Kapua'ala Sport		lembaga lainnya. rezim hukum lokal termasuk prinsip keadilan restoratif dalam perlakuan masyarakat adat dapat membuat keputusan yang sesuai standar hak asasi manusia internasional penentuan nasib sendiri masyarakat adat.
8.	Hambatan Greenpeace dalam Mengatasi Deforestasi di Brazil Pada Masa Pemerintahan Jair Bolsonaro Oleh : Uswatun Hasanah (2021)	<i>Extrativism Theory & Environmental Scarcity Concept</i>	Bagaimana Greenpeace menghadapi hambatan dalam mengatasi deforestasi di hutan Amazon, hambatan yang ditulis oleh para penelitian lain, kebijakan Jair Bolsonaro dan perusahaan dalam deforestasi berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan upaya Greenpeace untuk mengatasi deforestasi seperti petisi, kampanye, dan kolaborasi Greenpeace dengan pihak internasional.
9.	Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Asasi Manusia Internasional Oleh : Mirza Satria Buana	Hak masyarakat adat	Indonesia sebagai negara yang memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang dimana sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" maupun undang-undang dan peraturan yang mendukung keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat. Namun masih banyak kelemahan dalam implementasinya. sehingga, dalam proses pembangunan hanyalah menjadi ranah eksklusif bagi pemerintah dan pelaku usaha saja.
10.	Reducing deforestation in Colombia while building peace and pursuing business as usual extractivism?	Deskriptif	Program REDD di Kolombia yang bertujuan untuk perdamaian dan melindungi lingkungan justru program REDD+ berkontribusi pada pendekatan neoliberal yang kontradiktif. Hal tersebut kemudian menyebabkan terus

No.	Judul Penelitian	Metode/Teori/Konsep Penelitian	Hasil
	Oleh : Torsten Krause		menerusnya deforestasi dan degradasi di Kolombia.
11.	Tantangan Greenpeace Dalam Menangani Masalah Deforestasi di Papua Dalam Masa Pemerintahan Joko Widodo	<i>Theory of Change</i>	Greenpeace dalam menangani deforestasi di Papua pada masa pemerintahan Joko Widodo. Peraturan dan kebijakan pada pemerintahan Joko Widodo yang mendukung deforestasi. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan bagaimana upaya Greenpeace dalam mencegah keberlanjutan deforestasi melalui beberapa cara seperti kampanye, petisi, dan berkolaborasi dengan pihak internasional lainnya.

1.6 Landasan Konsep & Teori

1.6.1 Theory of Change

Penelitian di beberapa negara Asia menunjukkan hubungan antara masyarakat sipil dan demokrasi serta peran NGO masyarakat dalam mendorong perubahan politik yang lebih terbuka. Istilah tersebut sebenarnya kebalikan dari negara “negara masyarakat” atau masyarakat politik, yang pertama kali dicetuskan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat Barat, karena masyarakat sipil tidak muncul dari ruang hampa. Di sisi lain, masyarakat sipil adalah produk dari masyarakat tertentu, yaitu di Barat, masyarakat sosial, budaya, dan politik.²⁰

Masyarakat sipil disebut masyarakat politik, yang beradab dan memiliki landasan hukum untuk mengatur kehidupan. Perubahan Iklim Literatur tentang tentang peran masyarakat sipil global sebagai aktor dalam hubungan internasional

²⁰ Wan Asrida; Auradian Marta; Sofyan Hadi, Civil Society, Demokrasi dan Demokrasi, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 20 No. 02 Tahun 2021, Hal. 132

semakin terlihat semakin terlihat seiring dengan meningkatnya partisipasi dan kontribusinya terhadap politik global kontemporer. Inisiatif yang didukung oleh masyarakat sipil global mendukung inisiatif lembaga global dan pemerintah nasional untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh potensi patologi globalisasi, terutama setelah perang dingin. Globalisasi, terutama setelah perang dingin.²¹

Negoisasi perubahan iklim mungkin merupakan contoh yang paling terlihat, dengan lebih dari 1500 jenis organisasi pemantauan non-pemerintah (organisasi lingkungan, organisasi bisnis, universitas) saat ini terakreditasi. “kursi di meja” dan dengan demikian mewakili negara dan organisasi non-pemerintah dalam satu orang adalah luar biasa, karena hampir tidak terpikirkan di arena politik global penting lainnya, seperti perdagangan global, Kerjasama moneter dan keuangan atau lembaga pengatur keamanan.

Meningkatnya peran masyarakat sipil dalam diplomasi lingkungan global seringkali dijelaskan oleh 2 argumen; pertama, perwakilan masyarakat sipil memberikan informasi informasi dan pengetahuan yang berharga kepada pemerintah, sehingga membantu mereka mencapai kesepakatan yang “lebih baik” atau lebih efektif. Kedua, mereka memberikan legitimasi antar pemerintah, sehingga mengurangi “deficit demokrasi” dalam pengambilan keputusan politik global yang menghindari arena politik domestic dan negara.²²

²¹ Masroer C Jb dan Lalu Darmawan, 2016, Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia, Sosiologi Reflektif Vol. 10 No. 2, Hal. 36

²² Thomas Bernauer and Carola Betzold, Civil society in Global Environmental Governance, The Journal of Environmental & Development Vol 21 No. 1, Hal. 63

1.6.2 *Environmental Scarcity*

Sumber daya dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu; energi tak terbarukan seperti minyak dan besi dan energi dan yang terbarukan seperti air tawar, hutan, tanah subur, dan lapisan ozon. Kelangkaan lingkungan mengarah kepada sumber daya alam yang dapat terbarukan mengalami penurunan. Pada dasarnya terdapat 3 cara sumber daya alam terbarukan dapat mengalami kelangkaan, yaitu :

1. Terdapat bertambahnya permintaan yang meningkat drastis karena adanya pertumbuhan populasi yang terus menerus meningkat sehingga konsumsi sumber daya alam juga akan meningkat yang menyebabkan terbatasnya sumber daya alam untuk setiap individu.
2. Disebabkan karena pasokan, yang berarti degradasi lingkungan merupakan penyebab dari berkurangnya sumber daya alam yang terbatas atau tidak dapat diperbarui. Sehingga dapat mengurangi jumlah yang ada untuk setiap individu.
3. Karena adanya kelangkaan struktural, yang dimana terdapat ketidaksetaraan dalam pembagian sumber daya alam kepada masyarakat yang menyebabkan sumber daya tersebut langka untuk sebagian populasi manusia.²³

Perubahan lingkungan yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas energi terbarukan terjadi lebih cepat oleh manusia daripada oleh proses alam itu sendiri. Kelangkaan lingkungan adalah teori dari studi keamanan lingkungan yang

²³ Bingham Kennedy Jr, *Environmental Scacity and Outbreak of Conflict*, diakses dalam <https://www.prb.org/resources/environmental-scarcity-and-the-outbreak-of-conflict/> (28/04/2022 0:04)

menjelaskan bahwa kelangkaan lingkungan disebabkan oleh peristiwa alam dan faktor fisik lainnya seperti permintaan, penawaran, dan struktur.²⁴

Banyak literatur lingkungan yang memiliki kelemahan dimana tidak menjelaskan dengan tepat bagaimana variabel lingkungan yang sangatlah berhubungan erat dengan variabel lainnya seperti sosial, ekonomi, politik, dan lainnya yang juga berhubungan dengan konflik. Hal tersebut kemudian diungkapkan oleh beberapa peneliti lingkungan yang mengungkapkan bahwa variabel lingkungan sangatlah susah jika dilihat sebagai variabel independen karena banyaknya variabel intervensi. Gleditsch mengatakan bahwa banyaknya variabel yang mengintervensi sehingga membuat model tidak dapat diuji dan juga literatur lingkungan melupakan variabel yang sangatlah penting yaitu tipe rezim.²⁵

Deforestasi sekarang telah menjadi isu lingkungan yang sangat banyak menarik perhatian banyak orang karena permasalahan yang ditimbulkan sangatlah kompleks dan mengakibatkan perubahan iklim secara global seperti pemanasan global.

Selain itu, hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati merupakan PR bagi pemerintah dalam mengatasinya. Teori ini seharusnya dapat menjelaskan deforestasi dengan mempertimbangkan tiga jenis kelangkaan lingkungan sebagai supplies, yang akan menjelaskan awal deforestasi di masa pemerintahan Joko Widodo, Demand-Induced menjelaskan lebih memilih peningkatan yang pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi dan sejalan dengan tujuan Joko Widodo untuk lebih berorientasi pada pembangunan daripada konservasi.

²⁴ Val Percival & Thomas Homer-Dixon, *Environmental Scarcity and Violent Conflict: The Case of South Africa*, Journal Of Peace Research Vol. 35, No.3, May 1998, Kanada: University of Toronto, hal. 280

²⁵ Philip Stallet, 2003, *Environmental Scarcity and International Conflict*, Conflict Management and Peace Science Vol. 20 No. 20, Hal. 36

Sementara itu, Structural indicate menjelaskan dampak dari deforestasi, seperti sumber daya yang tidak merata antara pemerintahan dan suku adat yang terkena deforestasi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana istilah kualitatif adalah penelitian yang membahas dan mencapai hasil yang tidak menggunakan data numerik (pengukuran, perhitungan).²⁶ Konsep deskriptif analisis sebagai penelitian yang menggambarkan satu masalah dengan menggambarkan objek penelitian didasarkan pada fakta-fakta yang muncul begitu saja terhadap sekelompok orang atau peristiwa menurut Hadari Nawawi.²⁷

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan Teknik pengumpulan data. Library research (studi kepustakaan) dan Internet based reaserch, mengumpulkan berbagai sumber seperti literatur, jurnal, arsip, dokumen, berita, dll. Ada dua jenis data dalam Teknik pengumpulan data ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data primer yang bersifat resmi, biasanya dokum pemerintah, organisasi, laporan resmi, arsip, dll. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan atau data yang berasal dari data primer tetapi ditransmisikan melalui perantara (media, cetakan, kutipan dari orang kedua) yang tidak diterima

²⁶ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Equilibrium* 5, no. 9 (2009)

²⁷ Hadari dan Nawawi and Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

oleh pihak pertama. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini karena akses ke data primer terbatas.²⁸

1.7.3 Teknik Analisa Data

Melihat buku “Qualitative Data Analysis” yang ditulis oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, ada tiga langkah yang terlibat dalam analisis data kualitatif. Pertama, minimisasi data mengacu pada proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam transkrip lapangan dan laporan akhir.²⁹ Kedua, visualisasi data, dimana data dikemas dan diatur, memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan yang harus diambil. Ini dirancang untuk mengumpulkan informasi secara sistematis sehingga analis dapat melihat sorotan baru dari suatu peristiwa dan beralih ke peristiwa berikutnya. Ketiga, fase inferensi dan verifikasi, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi, kesimpulan awal yang disajikan bersifat tentative hingga ditemukan bukti yang mendukung data. Verifikasi data adalah proses pengumpulan bukti. Kesimpulan akhir juga ditampilkan hingga akhir pengumpulan data.³⁰

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dimulai dengan munculnya deforestasi di hutan Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan membentuk kebijakan yang berdampak pada masyarakat sekitar dan nasional, ekonomi, organisasi, masyarakat yang terlibat di sektor lingkungan dan bisnis.

²⁸ Nawawi and Martini

²⁹ Matthew B. Miles, Michael Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis*, (2nd ed.), California: SAGE Publications, hal. 10

³⁰ Ibid, hal. 11

1.8.1 Batasan Waktu

Ruang lingkup penelitian ini adalah deforestasi yang terjadi di Papua pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau pada tahun 2014 hingga yang meresahkan masyarakat dan bagaimana tantangan dari Greenpeace sebagai NGO lingkungan dalam menangani masalah deforestasi hutan di Papua ini.

1.8.2 Batasan Materi

Penelitian ini memiliki batasan materi yaitu peningkatan deforestasi di tahun 2013-2017 yang dimana bertepatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan melihat bagaimana GreenPeace selaku NGO terhambat dalam menangani maupun mengurangi deforestasi di Papua.

1.9 Argumen Pokok

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan argument pokok pada penelitian ini yaitu, tantangan yang dilalui Greenpeace dalam menyelesaikan permasalahan deforestasi di hutan Papua? Hal ini karena tidak ada bantuan dukungan dari pemerintah Indonesia atau Papua dalam membantu melindungi hutan Papua yang berbentuk kebijakan-kebijakan yang berpihak pada lingkungan. Selain itu, hak asasi masyarakat adat terabaikan sehingga masyarakat adat merasakan dampak langsung dan merugikan akibat deforestasi Papua.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini untuk memberi batasan pembahasan mengenai apa yang akan diteliti antara lain:

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	Bahasan Pokok
BAB I : Pendahuluan	1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademisi 1.4.2 Manfaat Praktis 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Landasan Konsep & Teori 1.6.1 Civil Society 1.6.2 <i>Environmental Scarcity</i> 1.7 Metode Penelitian 1.7.1 Jenis Penelitian 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 1.7.3 Teknik Analisa Data 1.8 Ruang Lingkup Penelitian 1.8.1 Batasan Waktu 1.8.2 Batasan Materi 1.9 Argumen Pokok 1.10 Sistematika Penulisan
BAB II : Deforestasi di Indonesia dan Gambaran Greenpeace	2.1 Deforestasi di Papua 2.1.1 Awal Mula Terjadi Deforestasi di Papua 2.1.2 Peran Investor terhadap Deforestasi Berkelanjutan (Demand Induced) 2.1.3 Ketidakadilan Pembagian Sumberdaya antara Pemerintah dengan Suku Adat (Structural Induced) 2.2 Manfaat Sosial Ekonomi dari Deforestasi 2.3 Gambaran Greenpeace 2.3.1 Sejarah Greenpeace 2.3.2 Keberhasilan Greenpeace Dalam Menangani Permasalahan Hutan di Negara Lainnya
BAB III : Upaya Greenpeace dalam Menangani Deforestasi di Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo	3.1 Petition 3.1.1 Petition Saya Bersama Hutan Papua 3.2 Campaign 3.2.1 Campaign Save Papua Forest 3.1.1 Video Campaign " <i>Palm Oil in Papua: A Burning Issue</i> /

BAB	Bahasan Pokok
	<p style="text-align: center;">A <i>Greenpeace Investigation</i></p> <p style="text-align: center;">3.1.2 <i>Social Media Campaign</i></p> <p>3.3 Greenpeace dan Kerjasama Internasional dalam Melindungi Hutan Papua</p> <p style="margin-left: 20px;">3.3.1 Forest Watch</p> <p style="margin-left: 20px;">3.3.2 Masyarakat Adat</p>
<p>BAB IV : Tantangan GreenPeace dalam Menekan Deforestasi yang Terjadi</p>	<p>4.1 Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro-Lingkungan</p> <p style="margin-left: 20px;">4.1.1 Kebijakan terkait Land Swap</p> <p>4.3 Respon Pemerintah Terhadap upaya Greenpeace</p> <p>4.2 Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro-Hak Asasi Masyarakat Adat</p>
<p>BAB V : Penutup</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

